

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi banyak negara di dunia. Masalah ini perlu dikaji secara serius dan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, tetapi juga dari kalangan akademisi khususnya para ahli ekonomi dan sosial serta masyarakat pada umumnya. Sebab, kesuksesan dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Jika hal ini tidak dilakukan maka kemiskinan akan selalu menjadi candu dalam upaya pembangunan sebuah negara. Sebagaimana pendapat yang disampaikan (Todaro & Smith, 2011) bahwa kemiskinan merupakan inti dari semua masalah pembangunan.

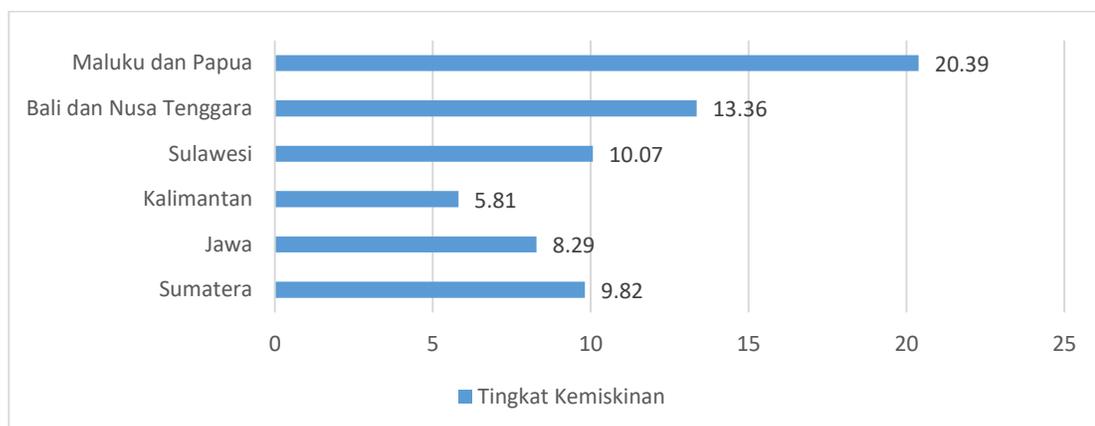
Kemiskinan di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru. Sejak Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, terdapat cita-cita besar bangsa yakni menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pada masa awal kemerdekaan, jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk tinggi sebagai akibat dari penjajahan. Pasca kemerdekaan tepatnya pada 1970, Badan Pusat Statistik mencatat masih terdapat sekitar 70 juta penduduk miskin atau 60 persen dari total penduduk Indonesia. Kenyataan ini membuat kemiskinan menjadi masalah prioritas yang terus ditangani.



aat ini, kemiskinan di Indonesia berangsur menurun baik dari sisi jumlah persentasenya. Laporan Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan tingkat an nasional per September 2022 adalah 9,57 persen atau masih terdapat

sedikitnya 26,36 juta penduduk miskin di Indonesia. Meskipun angka tersebut turun signifikan dari awal kemerdekaan, kemiskinan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Data kemiskinan berdasarkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia pada 2023 menempatkan persentase kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua yang termasuk dalam KTI memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang termasuk dalam KBI.



Gambar 1.1 : Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau di Indonesia, 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Jika disandingkan dengan data kemiskinan nasional yang hanya berkisar 9,57 persen (2023), maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi pada KTI. Sebab, seluruh pulau yang ada di KTI memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Namun, jika dilihat secara lebih detail melalui Tabel 1.1 di bawah ini, tidak seluruh provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.



Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Timur Indonesia 2023

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1.	Nusa Tenggara Barat	13,98	13,66	13,82
2.	Nusa Tenggara Timur	9,00	24,11	20,33
3.	Sulawesi Utara	5,04	10,16	7,34
4.	Sulawesi Tengah	9,13	13,79	12,30
5.	Sulawesi Selatan	4,98	11,81	8,66
6.	Sulawesi Tenggara	7,22	13,60	11,27
7.	Gorontalo	4,49	24,52	15,51
8.	Sulawesi Barat	9,33	12,58	11,92
9.	Maluku	5,90	24,54	16,23
10.	Maluku Utara	6,17	6,45	6,37
11.	Papua Barat	7,64	32,12	21,43
12.	Papua	5,29	35,68	26,80
Indonesia		7,53	12,36	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

Catatan : Tidak menyertakan Provinsi Bali dalam KTI

Dari Tabel 1.1 di atas, hanya 3 (tiga) provinsi di KTI yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah atau di bawah persentase kemiskinan nasional yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Sedangkan 9 (sembilan) provinsi lainnya memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional. Beberapa di antaranya bahkan memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 20 persen yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Berangkat dari fenomena ini,

an di KTI mendesak untuk segera ditangani dan dicarikan alternatif solusi
nurunkan atau bahkan mengentaskan kemiskinannya.



Upaya pengentasan kemiskinan memang melibatkan banyak pihak, namun pemerintah merupakan inisiator dan eksekutor utama yang memainkan peran tersebut. Intervensi pemerintah mutlak diperlukan dalam masalah ini apalagi bagi negara yang menganut sistem ekonomi campuran seperti Indonesia. Berdasarkan teori keuangan publik, pemerintah dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi termasuk kemiskinan melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua kebijakan itu dapat bersinergi untuk mengatasi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel lain.

Diskursus mengenai pengentasan kemiskinan telah banyak ditemukan. Lewis (1954) mengungkapkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan orang menjadi miskin antara lain tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Sementara Nurkse (1971) menyebutkan kemiskinan juga disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat. Sen (1982) mendukung anggapan di atas bahwa kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, ketiadaan kemampuan (kapabilitas) penduduk, dan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Dari ketiga pandangan di atas, berbagai program pengentasan kemiskinan digulirkan oleh pemerintah di berbagai negara. Di Indonesia, secara umum terdapat tiga model kebijakan pengentasan kemiskinan yakni pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan pemberdayaan (Kuncoro, 2015). Dalam pendekatan langsung, pemerintah memberikan subsidi atau perlindungan sosial langsung kepada masyarakat miskin. Hal ini seperti tampak pada program penyediaan beras masyarakat miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Dalam pendekatan tidak langsung dan pemberdayaan, pemerintah mengupayakan pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (Indeks Pembangunan Manusia/IPM) maupun pertumbuhan ekonomi. Masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha diberikan pelatihan yang sesuai dengan minatnya sehingga dikemudian hari mereka dapat bekerja dengan keahlian yang dimiliki. Sedangkan masyarakat miskin yang telah memiliki usaha dapat mengikuti program pemberdayaan agar usahanya semakin berkembang dan mampu menggerakkan perekonomian secara nasional.

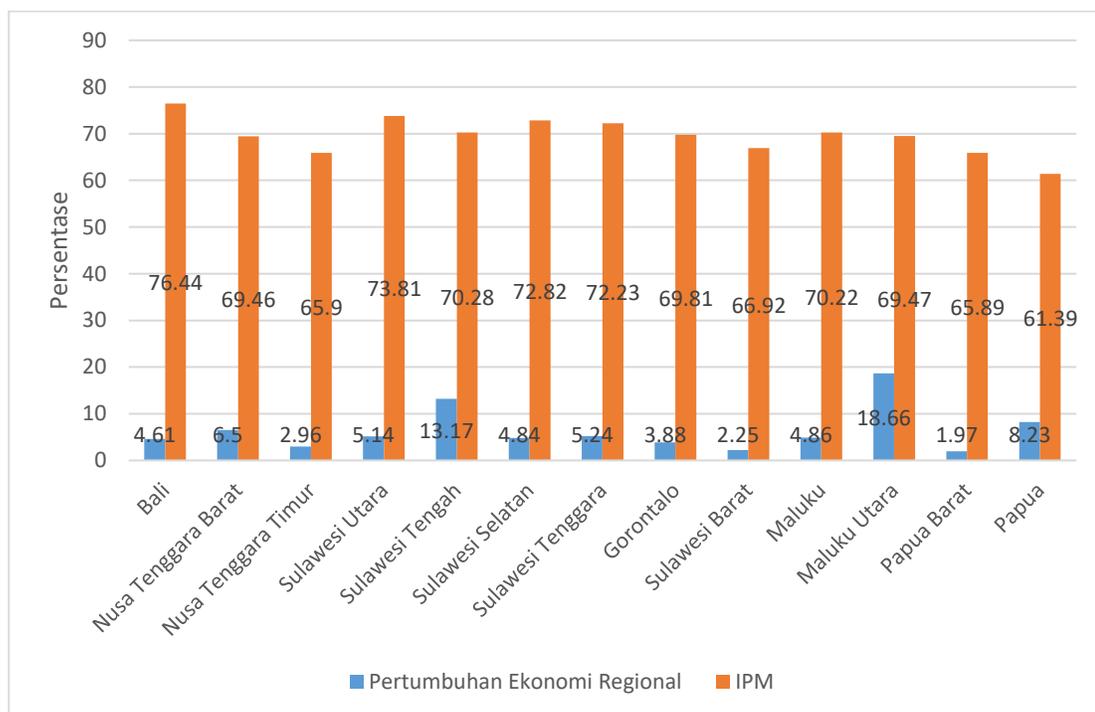
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dari sisi fiskal tampak pada fungsi belanja APBN dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi. Sementara dari sisi kebijakan moneter tampak pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut dimaksudkan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan kedua variabel itu dapat dimaknai sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produksi barang/jasa di dalam negeri. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, kebutuhan terhadap tenaga kerja, dan konsumsi agregat.

Pemerintah mulai gencar memberikan program pemberdayaan masyarakat melalui KUR sejak 2007. Pemberian KUR oleh pemerintah yang menasar pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didasarkan pada kontribusi UMKM yang sangat besar dalam struktur perekonomian nasional yakni 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Selain itu, UMKM juga mempunyai perputaran

yang cepat, menggunakan produk domestik, dan bersentuhan langsung masyarakat.



Sementara itu, IPM berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan variabel yang mencerminkan tingkat penacapaian kesejahteraan penduduk atas berbagai layanan dasar (Alam & Wahyudin, 2017). Badan Pusat Statistik menggunakan empat indikator dalam pengukuran IPM di antaranya: angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan; dan kemampuan daya beli sebagai indikator standar hidup.



Gambar 1.2 : Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.



PS (2021) menyatakan terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki nilai tinggi yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Provinsi DKI Jakarta

dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan nilai IPM lebih dari 80 persen. Meskipun tidak ada provinsi yang memiliki IPM di bawah 60 persen atau kategori rendah, namun mayoritas provinsi yang berada pada posisi bawah berasal dari KTI. Provinsi-provinsi sebagaimana dimaksud di antaranya Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, NTB, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Secara rata-rata, IPM di kawasan timur Indonesia adalah 68,39 persen.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, beberapa provinsi di KTI memiliki pertumbuhan ekonomi yang mengesankan seperti Sulawesi Tengah (13,17 persen) dan Maluku Utara (18,66 persen). Namun, terdapat pula provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang terlampau rendah seperti Papua Barat (1,97 persen) dan Sulawesi Barat (2,25 persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di KTI tidak merata bahkan timpang antara provinsi yang satu dengan provinsi lain meskipun dalam satu pulau yang sama.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa layanan sosial berupa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi. More dan Aye (2017) mengungkapkan pengaruh positif pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan perlu dikururkan lebih banyak dan lebih tepat sasaran. Jika belanja bidang pendidikan dan bidang kesehatan hanya diberikan kepada sekolah-sekolah elit, ras, atau gender tertentu yang terjadi adalah IPM dan pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Pada 1, kemiskinan juga tidak menurun.



Penelitian di atas mendukung penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Craigwell et al (2012) di mana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan variabel yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian sejenis pernah diungkapkan oleh Kahang & Budi Suharto (2016) yang mengambil objek penelitian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari kajian itu mendukung penelitian terdahulu di mana keduanya (belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan) dapat meningkatkan IPM.

Analisis Klugman et al (2011) terkait hubungan pendidikan dan IPM adalah sangat erat. Pendidikan yang baik dapat membantu mengurangi kemiskinan. Seseorang yang memperoleh pendidikan tinggi akan memiliki akses (peluang) yang lebih baik ke pekerjaan layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Melalui pendidikan pula, standar hidup masyarakat bergerak ke arah yang positif seiring dengan meningkatnya IPM. Secara keseluruhan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberi dampak positif pada perkembangan manusia dan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkontribusi pada peningkatan IPM.

Terkait dengan pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Suparno (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi khususnya dalam pengadaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengeluaran pemerintah pada bidang ini membutuhkan biaya yang besar dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur mempunyai masa an yang memakan waktu dan manfaat dalam jangka panjang.



Studi lainnya menyebutkan infrastruktur memang tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara agregat pasca diresmikan atau selesai pengerjaan. Selain itu, pengadaan infrastruktur juga membutuhkan waktu yang lama baik dalam perencanaan, proses pembangunan, hingga pemanfaatannya. Oleh karena itu, beberapa kajian menilai bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hidayat & Azhar, 2022; Anitasari & Soleh, 2015; dan Ladung, 2018). Setelah infrastruktur digunakan oleh masyarakat secara luas baru kemudian dapat menurunkan kemiskinan sebagaimana yang diharapkan (Amalia et al., 2018).

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi dapat terwujud pula dalam bentuk program bantuan sosial, jaring pengaman sosial, pembangunan daerah tertinggal, hingga dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dapat memainkan peran besar dalam mengurangi kemiskinan. Program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi pangan dan program jaminan sosial dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi (Agustin, 2022; Fadhli & Nazila, 2023). Sementara pengeluaran untuk pembangunan daerah tertinggal dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi akibat ketimpangan wilayah (Syahza & Suarman, 2014). Meskipun terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan yang daerah tertinggal lebih kecil dibanding daerah non tertinggal (Waluyo & rrofik, 2021).



Berkaitan dengan KUR yang diberikan pemerintah, banyak peneliti yang menyebutkan bahwa pemberian KUR sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM (Setiawan et al., 2023). Di sisi lain, KUR juga mampu mengatasi masalah kemiskinan, sebab hasil kajian lainnya menunjukkan adanya pengaruh negatif dari variabel tersebut (Sujarweni & Utami, 2015; Iztihar, 2018; dan Dondokambey, 2022).

KUR memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali mengalami keterbatasan modal. Melalui pembiayaan dengan bunga rendah, KUR diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan UMKM yang selama ini banyak tergantung kepada rentenir atau bahkan lembaga keuangan mengenakan bunga tinggi. Dari hal tersebut, KUR dapat mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi yang pada gilirannya memicu pendapatan dan kemandirian ekonomi. Secara agregat, KUR mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menurunkan kemiskinan.

IPM juga dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian ini telah banyak diuji oleh banyak peneliti seperti Grubaugh (2015), Wang et al (2018), Yolanda & Zulkarnain (2019), dan Utami (2020). Tingginya IPM akan menambah faktor produksi sehingga mampu meningkatkan output secara agregat. Tingginya IPM menunjukkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang semakin baik sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. IPM yang tinggi juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing di pasar global.



IPM juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan dan saling mempengaruhi. Apabila suatu daerah memiliki nilai IPM tinggi, masyarakatnya cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Akses tersebut membuat masyarakat berkesempatan untuk keluar dari kemiskinan semakin lebar. Bahkan, IPM yang tinggi dapat membantu menghentikan siklus kemiskinan yang berlangsung antar generasi. Oleh sebab itu, program pemerintah yang fokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat sangat diperlukan.

Permasalahan di atas menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi, serta pemberian KUR terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui IPM dan pertumbuhan ekonomi regional. Model ini juga menguji pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Dengan model ini, diharapkan masalah kemiskinan dapat ditelaah lebih rinci sehingga kemudian kebijakan penanggulangan kemiskinan khususnya di kawasan timur Indonesia lebih tepat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Kemiskinan di kawasan timur Indonesia merupakan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk di kawasan timur Indonesia tidak lebih banyak dari kawasan barat, namun persentase kemiskinannya lebih tinggi. Konsep kemiskinan ungkapkan Sen (1954) dan Nurkse (1971) menyatakan bahwa



kemiskinan dipengaruhi terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Akses terhadap keadilan sosial dapat diwujudkan dari akses terhadap pembiayaan (kredit) yang diberikan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?
2. Apakah belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?
3. Apakah belanja pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?
4. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?



5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.
2. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.
3. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah di bidang ekonomi terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.



4. Menganalisis pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.
5. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2013 – 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan teori maupun manfaat praktis sebagaimana berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak yang akan mendalami masalah belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mengkaji masalah kemiskinan khususnya di kawasan timur Indonesia baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.

3. Kegunaan Kebijakan

Hasil kajian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui fungsi alokasi khususnya belanja di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Bagian pertama pada BAB II akan menjelaskan perdebatan teori mengenai kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi regional, dan kebijakan makro ekonomi terkait pengentasan kemiskinan. Sajian perdebatan teoritis ini menjadi penting untuk dikaji secara deduktif. Sebab, kasus yang terjadi di lapangan bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk memperjelas gambaran peneliti dalam melakukan analisis melalui teori.

Hubungan antara variabel belanja (pengeluaran) pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan dapat dianalisis secara teoritis melalui interaksi masing-masing variabel dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Belanja dan intervensi pemerintah yang diproksi oleh belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan, belanja di bidang ekonomi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi faktor penting dalam meningkatkan IPM mengingat belanja tersebut merupakan sektor-sektor strategis. Menurut teori Keynesian (Blinder, 2008) peningkatan belanja pemerintah juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi terutama di saat perekonomian mengalami stagnasi. Kemudian, ada hubungan tidak langsung antara

emerintah dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Teori *trickle-down* as (Thornton & Angello, 1978; Blackburn & Bose, 2003) menyatakan bahwa



pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan.

Berbagai teori tentang belanja pemerintah menawarkan perspektif yang berbeda mengenai peran dan efek pengeluaran publik terhadap ekonomi. Teori Keynesian (Blinder, 2008) menekankan pentingnya belanja pemerintah untuk stabilitas ekonomi dan *multiplier effect* yang dihasilkan. Namun, belanja tersebut nyatanya tidak serta merta menghasilkan apa yang diharapkan sebab sering kali kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kelompok tekanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam teori *public choice* (Boyne, 1998; Shaw, 2002) yang pada akhirnya belanja pemerintah justru menimbulkan masalah inefisiensi dan pemborosan.

Musgrave (1993) dalam teori fungsi fiskal mengingatkan bahwa fungsi utama belanja pemerintah adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sehingga, bagaimanapun kebijakan pemerintah terkait belanja perlu diarahkan untuk mencapai efisiensi alokasi, keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Teori New Keynesian (Mankiw, 1995) juga menambahkan pentingnya intervensi pemerintah dalam bentuk belanja untuk mengatasi kegagalan pasar utamanya yang berkaitan dengan masalah pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Menurut teori ini harga dan upah membuat kondisi ekonomi tidak selalu menyesuaikan diri secara cepat sehingga belanja pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan.



Belanja pemerintah juga perlu diarahkan untuk mencapai pembangunan utam yang didalamnya mencakup pendidikan sebagai investasi ekonomi, dan

kesehatan sebagai penentu produktivitas sebagaimana diungkapkan dalam teori modal manusia/*human capital theory* (Tan, 2014). Teori tersebut didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi endogen (Howitt, 2010; Wijayanto, 2019) di mana pendidikan dianggap sebagai sumber inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta kesehatan sebagai modal lain untuk memastikan individu sehat dan dapat bekerja secara produktif. Secara keseluruhan, belanja tersebut akan mendorong IPM dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kemiskinan sebagai topik utama dalam disertasi ini juga tidak lepas dari perdebatan teori. Terdapat beberapa teori yang membahas kemiskinan. Teori individualistik (Calnitsky, 2018) menganggap karakteristik dan pilihan individu seperti perilaku (kurangnya motivasi), sikap (tidak adanya kemampuan), dan keputusan pribadi (keputusan keuangan yang tidak tepat) dapat menjadi penyebab kemiskinan. Teori ini terbatas hanya pada individu, padahal faktor di luar itu masih banyak dijumpai sehingga muncullah teori struktural yang menyatakan kemiskinan disebabkan oleh hasil ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (Calnitsky, 2018; Davis, 2014). Faktor eksternal seperti sistem ekonomi, diskriminasi, dan kebijakan pemerintah berperan besar dalam menciptakan kemiskinan struktural.

Berikutnya terdapat teori *human capital* yang menilai bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan individu (Tan, 2014). Teori inilah yang akhirnya menjadi dasar penulis menyatakan bahwa kemiskinan dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh belanja pemerintah (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) melalui IPM dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan oleh seseorang dapat menghambat dirinya



untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, dengan pendidikan dan keterampilan seseorang mungkin akan lebih berpeluang memperoleh pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang memadai. Oleh sebab itu, teori ini mendukung pentingnya pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi untuk membantu individu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Adapun kesehatan, sekali lagi, dianggap sebagai penentu produktivitas sebab kondisi kesehatan yang buruk akan membatasi kemampuan individu untuk bekerja secara produktif.

Demikian gambaran singkat mengenai perdebatan teori yang dibahas dalam disertasi ini. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah yang efektif dan tepat sasaran memiliki dampak positif pada peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi kemudian berkontribusi pada penurunan kemiskinan dengan menyediakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan membuka akses terhadap layanan dasar. Keempat variabel ini (belanja pemerintah, IPM, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan) saling mendukung dalam mendorong kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, dengan catatan bahwa distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi harus merata agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gambaran secara rinci dari setiap variabel akan dibahas dalam beberapa sub-bab berikut ini.

2.1.1. Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dipandang dari berbagai aspek. Tingkat keparahannya, kemiskinan dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan



seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum baik makanan maupun bukan makanan. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Agussalim, 2009).

Sedangkan berdasarkan penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan atas kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu atau lingkungan sehingga menyebabkan seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau memperoleh pekerjaan. Adapun kemiskinan struktural merujuk pada sistem sosial ekonomi yang memungkinkan terpusatnya kekuasaan dan sumber daya oleh pihak tertentu sehingga menghambat pihak lain untuk mengakses dan menggunakan sarana ekonomi dan fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dari sekian banyak anggapan ekonom tentang kemiskinan, teori kemiskinan yang diungkapkan oleh Nurkse (1971) masih relevan dengan kasus yang terjadi di lapangan. Teori kemiskinan itu dikenal dengan istilah *the vicious circle of poverty* atau lingkaran kemiskinan yang tidak berujung. Disebut demikian karena terdapat deretan melingkar kekuatan – kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan orang miskin tetap dalam keadaan melarat.



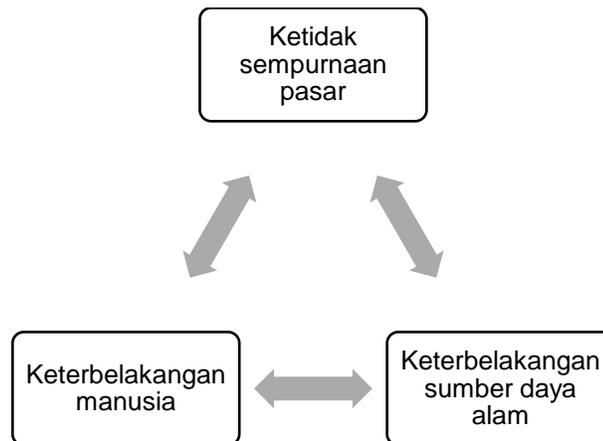
Rendahnya tingkat pendapatan secara nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah sehingga pada gilirannya tingkat investasi juga menjadi rendah. Tingkat investasi yang rendah membuat pengumpulan modal menjadi kurang yang selanjutnya berdampak pada rendahnya produktivitas. Sedangkan lingkaran kemiskinan yang dilihat dari sudut penawaran. Produktivitas rendah tercermin dari pendapatan yang rendah. Pada gilirannya, keadaan ini menyebabkan tingkat tabungan rendah. Pendapatan yang ada hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak adanya tabungan menyebabkan rendahnya investasi yang mengakibatkan kurangnya modal.

Gambaran keadaan di atas menjadikan negara berkembang selalu dalam keadaan miskin. Apalagi jika diperparah dengan keterbelakangan manusia, ketiadaan sumber daya alam, dan ketidaksempurnaan pasar. Padahal pengembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewiraswataan, maka sumber daya alam akan tetap terbengkelai, kurang atau bahkan salah guna. Keadaan ini selanjutnya berdampak pada pasar yang tidak sempurna.

Pasar yang tidak sempurna ditandai dengan sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, harga barang sepenuhnya dapat ditentukan oleh penjual tersebut. Bila fenomena ini terus menerus terjadi akan berdampak pada eksploitasi sumber daya alam. Dampak selanjutnya akan dapat melahirkan manusia serakah yang mementingkan diri sendiri bahkan mengabaikan keberlanjutan alam untuk



generasi masa depan (*moral hazard*). Hal ini sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan Menyangkut Keterbelakangan Manusia.
Sumber : Jhingan, 2018.

Dasar argumen Nurkse kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pemikir selanjutnya. Becker dan Mincer (1975) menuangkan hasil pemikiran tersebut dalam teori modal manusia (*human capital theory*). Teori ini menyatakan bahwa pendapatan yang diterima manusia dari hasil bekerjanya akan menentukan apakah dia miskin atau tidak. Pola pendapatan individu cenderung meningkat bersamaan dengan bertambahnya umur meskipun ketika mendekati masa pensiun pendapatannya semakin lama semakin turun. Bila pendapatan yang diperoleh tidak diinvestasikan untuk meningkatkan modal manusia baik dalam bentuk pendidikan atau pelatihan, keadaan ini lebih berpotensi menggiring manusia ke dalam kemiskinan. Sebaliknya, jika pendapatan yang diterima diinvestasikan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian, keadaan yang lebih baik di masa depan lebih dimungkinkan.



Pemikir lain, Schiller (1976) memberikan argumen bahwa karakter yang *awed character*) dan kesempatan yang terbatas (*restricted opportunity*)

adalah dua hal yang berpengaruh dalam kemiskinan. Sesungguhnya orang miskin memiliki kesempatan yang cukup untuk meningkatkan status ekonomi tetapi kekurangan inisiatif dan ketekunan untuk mengambil kesempatan tersebut. Di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki tidak memiliki akses yang memadai sehingga selamanya akan berada di pusaran kemiskinan. Hal ini dapat digambarkan dalam dualisme pasar tenaga kerja di mana sektor primer (formal) menawarkan gaji yang tinggi dan promosi jenjang karir yang lebih baik. Sedangkan sektor sekunder (informal) memiliki keadaan sebaliknya.

Pemikir selanjutnya yang menyoroti masalah kemiskinan adalah Amartya Sen (1981) yang sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa orang disebut miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya ia mendukung upaya pengukuran kemiskinan melalui garis kemiskinan yang ditetapkan. Anggapan Sen, kemiskinan tidak hanya pada masalah kebutuhan dasar makanan tetapi juga kebutuhan lainnya terutama mengenai upaya meningkatkan kemampuan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Ia menyatakan manusia hendaknya diberikan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi dan adanya jaminan keamanan. Oleh karenanya ia mengemukakan adanya pemerintah yang intoleransi dan totaliter (Sen, 1999).

Salah satu lembaga yang menghitung kemiskinan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran ini tercermin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan (*food line*) dan bukan makanan



(*non-food line*). Kombinasi keduanya menghasilkan apa yang disebut garis kemiskinan atau *poverty line* (Kuncoro, 2015).

BPS menilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari sebagaimana yang diungkapkan oleh Bank Dunia (World Bank). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Adapun kebutuhan bukan makanan terdiri atas perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mendefinisikan kemiskinan. Namun, penggunaan pendekatan kebutuhan dasar mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut (Kuncoro, 2015). Pertama, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran per kapita. Padahal kemiskinan sangat kompleks dan mempunyai banyak dimensi baik sosial maupun kultural. Kedua, metode ini kurang memperhatikan keterbandingan antar waktu dan antar wilayah. Ketiga, masih terdapat perdebatan tentang nilai standar minimum apakah harus didasarkan pada harga yang sebenarnya dibayarkan oleh penduduk miskin, atau harga yang sebenarnya dibayarkan oleh penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, atau yang tercatat dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk mengkalkulasi an, BPS menggunakan pendekatan kemiskinan absolut (*Head Count Index*)



dengan menghitung persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia telah mengalami evolusi. Pada mulanya, pembangunan manusia berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti pangan, papan, dan sandang. Hal itu ditujukan agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, Alatas (1977) mengungkapkan terjadi pergeseran makna pembangunan manusia ke arah kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di kemudian hari (akhirat).

Pada zaman pencerahan, pembangunan manusia kemudian lebih cenderung pada kemajuan intelektual agar masyarakat terdidik dan rasional. Pada masa selanjutnya, abad modern awal, pembangunan manusia terpusat pada kemajuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, pembangunan manusia saat ini semakin berkembang dan luas untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh dan berkelanjutan (Sen, 1999). Kesejahteraan yang menyeluruh artinya memperbaiki kualitas hidup manusia dalam semua aspek kehidupan termasuk di antaranya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Sejarah pembangunan manusia menunjukkan banyak faktor yang
aruh terhadap perkembangan pembangunan manusia. Faktor itu tidak
rasal dari dalam manusia (internal), tetapi juga dari luar manusia (eksternal)
erubahan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor tersebut ada kalanya



berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Pembangunan manusia ke depan juga dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, konflik, dan pengungsi tetap. Tantangan tersebut dapat menjadi ancaman yang mengarah pada keberlangsungan hidup manusia.

Konsep IPM berasal dari manusia itu sendiri sebagai sebuah modal (*capital*) dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan antara lain melalui bakat, keahlian, dan pengetahuan yang dapat memperkuat daya tawar menawar (gaji/pendapatan) di pasar tenaga kerja. Menurut Kuper (2000) modal manusia terbagi dua yakni umum dan khusus. Modal manusia secara umum berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi potensi seseorang dalam pekerjaan. Sedangkan secara khusus, modal manusia membahas hal-hal yang mempengaruhi pendapatan/gaji seseorang dalam perusahaan tertentu di mana mereka bekerja.

Konsep pembangunan manusia sejatinya terpusat pada manusianya dan tidak hanya pada aspek ekonomi semata. Pembangunan tersebut tidak hanya berupaya pada peningkatan kemampuan manusia tetapi juga pemanfaatan kemampuan tersebut secara maksimal. Menurut Tambunan (2015) pembangunan manusia didukung oleh empat pilar utama yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Untuk mengukur pembangunan manusia digunakan IPM. Indeks ini dikaji dari pengukuran angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup suatu daerah sesuai dengan standarisasi kelayakan hidup secara umum yang ditetapkan atau daerah. Penghitungan IPM dikembangkan oleh Amartya Sen (India), UI Haq (Pakistan), Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai



(London School of Economics) pada 1990. IPM seringkali digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimensi dasar yang dibahas adalah *longevity*, *educational achievement*, dan *access to resource* (Kuncoro, 2004).

Dimensi *longevity* mengukur hidup sehat dan panjang umur dengan angka harapan hidup saat kelahiran dan angka kematian perseribu penduduk. Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas. Angka umur 15 tahun ke atas digunakan karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Kedua indikator pendidikan ini mencerminkan tingkat pengetahuan penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Dimensi standar hidup layak diukur dengan PDB perkapita dengan terminologi *Purchasing Power Parity* (PPP) dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan kerja. PPP atau indeks daya beli di Indonesia diukur dari data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu.

Layaknya manusia yang selalu berkembang, IPM juga mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Terhitung telah terjadi lima kali penyempurnaan perhitungan IPM sejak 1990. Penyempurnaan signifikan terjadi 0 yang mengubah indikator penyusun IPM. Sedangkan pada 2014 terjadi in metode perhitungan.



Tabel 2.2

Perkembangan Metodologi IPM oleh UNDP

No.	Tahun	Perkembangan	Hal yang diubah
1.	1990	Launching	Komponen IPM: Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Metode agregasi: rata-rata aritmetik
2.	1991	Penyempurnaan 1	Mengganti komponen IPM menjadi UHH, AMH, RLS, PDB perkapita
3.	1995	Penyempurnaan 2	Mengganti komponen IPM menjadi UHH, AMH, APK Gabungan, PDB perkapita
4.	2010	Perubahan metodologi	Komponen IPM: UHH, HLS, RLS, dan PNB perkapita Metode agregasi: rata-rata geometrik
5.	2011	Penyempurnaan 3	Mengganti tahun dasar PNB perkapita dari tahun dasar 2008 menjadi 2005
6.	2014	Penyempurnaan 4	Mengganti tahun dasar PNB perkapita dari tahun 2005 menjadi 2011 Merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik

Sumber : BPS, 2023.

Keterangan :

- UHH : Umur Harapan Hidup
- AMH : Angka Melek Huruf
- PDB : Produk Domestik Bruto
- RLS : Rata-rata Lama Sekolah
- APK : Angka Partisipasi Sekolah
- HLS : Harapan Lama Sekolah
- PNB : Produk Nasional Bruto



Secara garis besar, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang, kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Terjadinya perkembangan

perhitungan IPM hingga yang terbaru menunjukkan bahwa ada indikator lain yang lebih tepat. Masuknya rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PDB yang digantikan oleh PNB juga didasarkan pada alasan bahwa PNB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan ekonomi telah mengalami perkembangan yang signifikan bahkan terus diperdebatkan. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah semua yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu daerah atau negara. Perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan *output* perkapita dari setiap periode (bisa bulanan maupun tahunan) dalam jangka panjang. Kedua definisi tersebut pada dasarnya adalah sama yaitu menitik beratkan pada pendapatan perkapita (Jhingan, 2000).

Dalam penelitian ini digunakan teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*). Sebab, teori ini memiliki perspektif yang lebih luas dari pada teori – teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang hanya menekankan pentingnya akumulasi modal. Akibatnya pemerintah dituntut membuka investasi seluas-luasnya agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada teori pertumbuhan endogen, faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kapital (K) dan tenaga kerja (L).



pendekatan neoklasik dianggap belum mampu menjelaskan pertumbuhan dengan baik sebab variabel perkembangan teknologi dianggap sebagai

variabel eksogen yang berasal dari luar. Teori pertumbuhan endogen mencoba memasukkan proses teknologi secara endogen sehingga diperoleh output industri atau perusahaan yang lebih baik (Romer, 1986). Teori pertumbuhan endogen berasumsi bahwa proses pertumbuhan berasal dari perusahaan atau industri. Dengan demikian, model pertumbuhan endogen menekankan kepada modal manusia dan penelitian dan pengembangan (*research and development*).

Menurut Lucas (1988) modal dalam teori pertumbuhan endogen dibedakan menjadi dua yaitu modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*). Investasi pada modal manusia diperoleh melalui proses belajar dan mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi ditentukan oleh investasi individu terhadap modal manusia.

Model matematis yang dikembangkan oleh Romer (1986), Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991) dalam menjelaskan teori pertumbuhan endogen adalah $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, di mana A = Total Factor Productivity, K = Modal, L = Tenaga Kerja, α = Elastisitas Output Modal. Jika populasi L bernilai konstan dan sama dengan 1 (satu), maka akan diperoleh persamaan $Y = AK$. Jika K melambangkan modal fisik dan *human capital*, maka *output* perkapita akan menjadi $\frac{Y}{L} = A \cdot \frac{K}{L}$, *i. e.* $y = Ak$ di mana, k adalah modal per tenaga kerja dan y adalah output atau pendapat per pekerja. Karena modal merupakan akumulasi dari tabungan individu dan investasi dari beberapa output yang dihasilkan dalam perekonomian, maka persamaan untuk modal adalah $\dot{K} = sY - dK$, di mana, s adalah *saving rate* (tingkat tabungan), dan d adalah tingkat depresiasi. Dengan demikian, *marginal product of unit of capital* tidak selalu menurun jadi penambahan modal.



Pelopop teori pertumbuhan endogen, Romer (1986), menyatakan bahwa perkembangan teknologi bergantung pada jumlah total investasi pada pengetahuan. Total investasi tersebut ditentukan oleh keputusan individu pada setiap perusahaan. Investasi pada pengetahuan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor penelitian dan pengembangan. Peningkatan *knowledge* perusahaan akan semakin tinggi jika perusahaan memiliki *stock of private knowledge* yang juga tinggi. Model fungsi produksi yang dikembangkan oleh Romer adalah $Y = K^a (AL_y)^{1-a}$ di mana K adalah akumulasi kapital, L adalah pertumbuhan tenaga kerja, dan A bermakna jumlah ide atau *stock of knowledge accumulated*. Dalam persamaan tersebut, A disandingkan dengan L (AL) yang berarti bahwa tenaga kerja selain digunakan untuk memproduksi barang dan jasa juga digunakan untuk memproduksi ide-ide baru.

2.1.4. Kebijakan Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi secara umum memiliki dua cabang ilmu yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan seperti kemiskinan. Beberapa tokoh yang terkenal dalam cabang ilmu ini antara lain John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Paul Samuelson. Pendapat yang mereka kemukakan memiliki persamaan mengenai peran penting negara (pemerintah) untuk hadir mengatasi permasalahan ekonomi melalui kebijakan fiskal atau moneter.



pengeluaran atau Belanja pemerintah (*government expenditure*) adalah dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk

mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam APBD terdiri atas tiga komponen yakni penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Belanja daerah biasa juga disebut sebagai belanja pemerintah. Belanja daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan belanja pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Menurut pandangan Keynes (1930) bahwa campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga. Model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.



ada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan belanja pemerintah yang untuk penanaman modal pemerintah, utamanya untuk menyediakan

infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, penanaman modal tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan penanaman modal sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, belanja pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, penanaman modal swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi penanaman modal pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke belanja untuk aktivitas social seperti halnya program pension, program jaminan kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Teori yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow ini merupakan suatu pandangan yang diambil dari pengamatan di banyak negara.

Selanjutnya Peacock dan Wiseman mengemukakan suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar belanja, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai belanja pemerintah tersebut. Masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah.



enurut Peacock dan Wiseman, pemungutan pajak yang semakin tinggi
 1 tarif pajak tidak berubah akan menyebabkan belanja pemerintah akan

meningkat. Itulah sebabnya, dalam keadaan normal, pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam GNP yang meningkat akan menyebabkan penerimaan pemerintah juga akan meningkat sekaligus juga meningkatkan belanja pemerintah (Mangkoesoebrota, 2010).

Selain kebijakan fiskal, kebijakan makro ekonomi juga berhubungan dengan kebijakan moneter. Perdebatan tentang mana yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional, apakah menggunakan kebijakan fiskal atau menggunakan kebijakan moneter, juga masih menjadi perdebatan. Tidak jarang, kombinasi di antara keduanya mutlak diperlukan. Secara umum, kebijakan moneter berarti semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar (Littleboy dan Taylor, 2006). Sebagai bagian dari kebijakan makro ekonomi, kebijakan moneter ditujukan untuk membantu mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran (Natsir, 2011). Menurut Maski (2007) sasaran utama dari kebijakan moneter hanya bisa dilihat pencapaiannya dalam jangka panjang. Segala sesuatu yang dipersiapkan sekarang ditujukan untuk mencapai sasaran di masa yang akan datang.

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu kebijakan makro ekonomi dalam bidang moneter. KUR merupakan bentuk subsidi dari pemerintah untuk pemberian kredit atau pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha Jangka waktu KUR dibedakan menjadi tiga skema yaitu jangka pendek,



jangka menengah, dan jangka panjang. KUR jangka pendek memiliki jangka waktu kredit selama satu tahun. Sedangkan KUR jangka menengah berjangka antara satu hingga tiga tahun. Adapun KUR jangka panjang lebih dari tiga tahun.

Dari sisi jaminan, KUR dapat berbentuk kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) dan kredit dengan agunan (*secured loan*). Meskipun KUR didorong tanpa adanya agunan (Sukarjono dan Purnomo, 2014) namun dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa agunan. Pelaksanaan KUR pada awalnya ditujukan pada kebijakan yang pro terhadap kemiskinan (*pro poor*) dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Pembiayaan KUR kemudian mengalami perubahan kebijakan untuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Upaya perluasan juga dilakukan untuk mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi para pelaku UMK (Aristanto, 2019).

2.2. Tinjauan Empiris

Kajian penelitian sebelumnya diperlukan untuk mengetahui bagian apa yang telah diteliti dan bagian apa yang belum diungkap. Berikut ini dikemukakan beberapa hasil studi empiris yang pernah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri yang menggunakan variabel ataupun model yang relatif sama dengan penelitian ini. Tinjauan empiris yang disajikan dalam bentuk tabel dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan uraian pembahasan tinjauan empiris adalah sebagai berikut.



Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Sejumlah paper telah banyak membahas keterkaitan IPM dengan kemiskinan. Hubungan kedua variabel itu adalah positif. Ketika terjadi kenaikan IPM, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Menurut Chremin & Nakabugo (2012) menyebutkan bahwa pendidikan yang merupakan komposisi IPM merupakan investasi jangka panjang yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pembukaan akses pendidikan yang selebar-lebarnya bagi masyarakat miskin mutlak diperlukan. Pendapat ini didukung oleh Yakunina & Bychkov (2015). Secara lebih komprehensif, mereka menyatakan bahwa IPM dapat mengurangi kemiskinan sebab pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan konsep dari human capital yang dapat memberi manfaat tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Hal ini juga diungkap dalam penelitian Mayer-Foulkes & Hafner (2015).

Singh (2012) secara spesifik menguji keterkaitan IPM dan kemiskinan dengan menggunakan data beberapa negara di kawasan Asia. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa keterkaitan IPM dengan kemiskinan semakin menguat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara diharapkan sepenuhnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar dalam mendukung rangka pembangunan manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan belanja pemerintah di bidang sosial.

Beberapa peneliti dari dalam negeri yang membahas keterkaitan kedua variabel di atas adalah Farida et al (2012), Rohmah dan Prakoso (2022), dan Risdiana (2020). Penelitian Risdiana (2020) bahkan dapat dikatakan lebih menarik dibanding i sebab ia meneliti secara spesifik keterkaitan gender dalam IPM. Hasil nya menyatakan bahwa peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan



harus ditingkatkan. Masih adanya anggapan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi perempuan dibantah dari hasil kajian ini.

Kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi juga perlu diberdayakan lebih jauh. Selain memiliki tingkat pendidikan yang rendah, perempuan juga lebih banyak yang bekerja di rumah dengan hanya mengurus rumah dan anak keturunan mereka. Sementara yang bekerja adalah suaminya. Inilah yang kemudian menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap penyakit mental. Padahal, kesehatan merupakan komposisi dalam IPM yang akan dapat mereduksi kemiskinan (Chotim dan Jannah, 2021).

Penelitian ini juga menguji pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak makalah membahas keterkaitan dua variabel di atas. Menurut Ranis et al (2000) hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi adalah kausalitas. Ketika IPM meningkat, maka akan terjadi *full employment* (penggunaan tenaga kerja secara penuh). Sebab, kualitas manusia semakin meningkat baik dari sisi kesehatan, pengetahuan, maupun pendapatan. IPM akan mendorong produksi dalam negeri semakin bertambah sehingga pada gilirannya pendapatan pekerja juga akan bertambah. Dalam beberapa kajian, semakin tinggi pendapatan seseorang dapat membebaskan dirinya dari perangkap kemiskinan. Pendapatan yang meningkat juga sejalan dengan kualitas hidup yang meningkat baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Oleh karena itu, hubungan di antara keduanya adalah hubungan kausalitas yang mana satu sama lain saling mempengaruhi.



rome dan Tondon (2010) juga mendukung penelitian sebelumnya di mana menemukan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong pengeluaran penduduk yang semakin tinggi untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya. Pengeluaran yang semakin meningkat menunjukkan kualitas standar hidup yang semakin tinggi sehingga kedua variabel di atas dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu, Gumeni & Gorica (2013) juga mendukung hasil kajian-kajian sebelumnya bahwa semakin tinggi IPM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Beberapa penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan. Terdapat perbedaan hasil yang dikemukakan oleh para peneliti. Ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan akan semakin berkurang. Namun tidak sedikit pula yang membantah bahwa pertumbuhan belum cukup mampu mengurangi kemiskinan.

Beberapa peneliti yang mendukung anggapan pertama adalah Suryahadi et al (2009), Zaman & Khilji (2013), Dollar et al (2016), serta Didu & Fauzi (2016). Suryahadi et al (2009) meneliti secara rinci pertumbuhan sektoral terhadap pengurangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitiannya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam pengurangan kemiskinan di kedua wilayah. Sementara Zaman dan Khilji (2013) juga mendukung kesimpulan sebelumnya meski dengan subjek penelitian yang berbeda.



Penelitian Dollar et al (2016) juga memperkuat anggapan di atas. Ia bahkan menganalisis subjek penelitian dari 121 negara selama 4 dekade. Hasil penelitian itu

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Kesimpulan ini diperkuat Didu dan Fauzi (2016) yang memakai data dari pertumbuhan ekonomi regional.

Anggapan kedua yang menganggap pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mereduksi kemiskinan diungkap oleh Cheema dan Sial (2012), Thorbecke (2013), dan Davies (2011). Penelitian ini umumnya menggunakan subjek yang memiliki kategori sama, yakni negara sedang berkembang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak pro terhadap masyarakat miskin. Hal ini tampak dari kue pertumbuhan yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan pemodal atau masyarakat kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat miskin hanya menikmati sedikit dari pertumbuhan ekonomi, bahkan tidak jarang mereka juga menjadi pihak yang dirugikan. Keadaan ini dibuktikan secara empiris dengan meningkatnya angka ketimpangan. Jadi, pertumbuhan ekonomi justru membuat distribusi pendapatan di masyarakat semakin timpang dan kemiskinan tidak berkurang.

Secara umum, banyak penelitian yang mengungkapkan korelasi negatif pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Arndt, McKay, dan Tarp (2016) mendukung anggapan tersebut melalui penemuannya di Afrika. Dollar et al (2016) juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tetap baik bagi masyarakat miskin, meskipun penikmat pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh kalangan menengah atas. Sebelum itu, Bourguignon (2003) terlebih dahulu menemukan hubungan tersebut.



elanja Bidang Pendidikan dan Kemiskinan

enurut Psacharopoulos & Patrinos (2004) pendidikan merupakan salah satu

faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Sebab, suatu negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas jika konsen terhadap pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, Melati & Burhany (2021) menyatakan sudah selayaknya bagi pemerintah untuk memiliki alokasi anggaran yang khusus diperuntukkan bagi dunia pendidikan. Belanja atau pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.

Dalam praktiknya, hampir setiap pemerintah (negara) di dunia ini memiliki anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Namun, praktik itu tidak terlepas dari korupsi. Bahkan, praktik korupsi di bidang pendidikan semakin beragam macamnya. Ini yang kemudian dapat menyebabkan tingkat kemiskinan tetap tinggi atau tidak turun meskipun anggaran pendidikan setiap tahun meningkat. Ragam korupsi di bidang pendidikan misalnya dana untuk pembangunan infrastruktur dan gedung, dana operasional, dana gaji dan honor guru, dana pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, bahkan dana yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu (beasiswa). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Demak et al (2020).

Berdasarkan penelitian lain seperti Muliza et al (2017), Duflo & Banarjee (2011), Nurvita et al (2022) belanja pendidikan tidak berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Akan tetapi, belanja pendidikan berpengaruh langsung terhadap peningkatan IPM terlebih dahulu. Sebab, pendidikan merupakan salah satu komposisi dari IPM. Jika anggaran pendidikan meningkat diharapkan juga IPM meningkat.



anladi et al (2015) menyebutkan bahwa pengaruh belanja pemerintah ra belanja pendidikan pengaruhnya tidak terbatas saja pada IPM, tetapi juga

pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Penelitian ini didukung oleh Mifrahi & Rahmat (2022) yang menyebut bahwa sejak era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didorong oleh meningkatnya belanja fungsi pendidikan. Namun, ada hal menarik dari hasil penelitian Sitorus dan Arsani (2018) yang mengemukakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak ditemukan di wilayah timur Indonesia khususnya Provinsi Papua. Padahal di daerah tersebut belanja pendidikannya tinggi.

Menurut Abbas & Foreman-Peck (2008) pendidikan mampu memberikan *multi-dimensional effect* pada manusia dan ekonomi. Selain meningkatkan pengetahuan manusia dan pembangunan, pendidikan dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kelayakan kerja. Dengan kualifikasi pendidikan tertentu yang lebih tinggi, seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dengan tingkat penghasilan tertentu yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan yang baik mampu mendorong perubahan positif pada lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif sehingga dapat menarik investasi domestik maupun asing.

United National Development Program (UNDP) menambahkan bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu negara juga tergantung pada bagaimana pengelolaannya pada pendidikan. Sebab, pendidikan dapat mendongkrak dan meningkatkan daya saing manusia sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif (UNDP, 2018). Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Hanushek (2013) yang mengkaji pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan pada beberapa negara di Afrika.



2.2.4. Belanja Bidang Kesehatan dan Kemiskinan

Belanja kesehatan merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai program-program pemerintah di bidang kesehatan. Hossain (2014) menyebut bahwa belanja pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penyediaan akses kesehatan bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan sebagai prioritas utama dalam program-program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, alokasi, dan penargetan program & kegiatan yang berpihak untuk penduduk miskin.

Demak et al (2020) juga menyatakan hal yang sama. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Setyadi & Indriyani (2021), ketika terjadi pandemi covid-19 tingkat kemiskinan ternyata meningkat. Penelitian lain juga menyatakan hal serupa baik di dalam negeri seperti yang dikaji oleh Suryahadi et al (2020) dari lembaga SMERU dan dari luar negeri sebagaimana hasil penelitian Pereira et al (2019), Whitehead et al (2021), Kharas dan Dooley (2021).

Hasil yang tidak sepenuhnya sama dipaparkan oleh Asare dan Barfi (2021) bahwa kesehatan tidak hanya berpengaruh pada kemiskinan tetapi juga pertumbuhan ekonomi secara agregat. Pertumbuhan ekonomi melemah selama periode tersebut akibat terhambatnya aktivitas manusia dalam perekonomian. Belanja dalam bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan, mengingat pada masa covid-19 hampir seluruh ekonomian mengalami pelemahan bahkan sampai pada taraf resesi. Dengan bertambahnya porsi belanja untuk kesehatan, maka hal tersebut



dapat mendorong upaya pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan. Belanja kesehatan yang menjangkau masyarakat miskin dapat mereduksi tingkat kemiskinan (Astri et al, 2013 dan Santoso et al, 2013). Faturrohim (2011) juga mengungkapkan hal yang senada. Tingkat kesehatan yang diproksi dari Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebab, kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan yang baik dapat mendorong produktivitas kerja yang semakin tinggi. Hal tersebut selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryani et al (2021) dan Trifani et al (2015) mendapatkan hasil penelitian yang sedikit berbeda. Mereka mengungkapkan bahwa pengaruh belanja kesehatan masih kecil kontribusinya terhadap IPM. Hal ini disebabkan karena penggunaan dana yang ada belum optimal. Meskipun, secara arah pengaruhnya sudah positif.

Arimah (2004) dalam penelitiannya di Afrika menyatakan bahwa belanja pemerintah khususnya di bidang kesehatan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif bagi kemiskinan. Program kesehatan yang diterapkan di sana berdampak pada meningkatnya kualitas hidup manusia. Hasil penelitian lain membantah kesimpulan yang sudah ada. Sanggelorang et al (2015) belanja kesehatan belum mampu mendongkrak IPM. Santoso (2015) juga menyatakan hal demikian sebab kenaikan penduduk Indonesia tidak sebanding



esarnya alokasi anggaran yang dikucurkan.

oom dan Channing (2003) dari Harvard University juga telah menyelidiki

keterkaitan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Di beberapa negara maju, kesehatan didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Penghasilan penduduk di negara maju yang tinggi mendorong kesadaran terhadap kebutuhan kesehatan. Kesehatan yang terjamin mampu meningkatkan produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berbeda dengan penduduk di negara berkembang yang masih terperangkap dalam kemiskinan. Pengeluaran penduduk untuk kesehatan cenderung minim sebab penghasilan yang mereka dapatkan utamanya digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pemerintah di negara berkembang perlu membuat program perlindungan kesehatan bagi warganya melalui fungsi alokasi belanja APBN. Intervensi tersebut mutlak diperlukan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan secara agregat.

2.2.5. Belanja Bidang Ekonomi dan Kemiskinan

Belanja bidang ekonomi diartikan sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja ekonomi merupakan salah satu fungsi alokasi belanja pemerintah dalam bidang ekonomi. Termasuk dalam belanja ekonomi adalah pengeluaran untuk investasi (program infrastruktur) dan pengeluaran untuk program-program sosial seperti pelatihan tenaga kerja. Belanja ekonomi juga mencakup pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan



ng suatu negara.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkat seiring dengan

meningkatnya belanja pemerintah dalam fungsi ekonomi. Anggapan ini telah banyak diuji dan menghasilkan kesimpulan yang sejalan sebagaimana diungkapkan oleh Nurmainah (2013) dan Mirza (2012). Jika dikaitkan dengan IPM, semakin tinggi belanja pemerintah dalam bidang ekonomi seharusnya juga akan berpengaruh bagi peningkatan IPM.

Hasil penelitian Jasmina et al (2016) yang melakukan penelitian terhadap 288 kabupaten/kota menemukan hasil bahwa belanja ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM. Dari beberapa pos belanja ekonomi, belanja untuk pertanian ialah yang paling signifikan pengaruhnya bagi kemiskinan. Hasil penelitian di atas juga didukung oleh Usman (2001) bahwasannya belanja ekonomi untuk sektor pertanian dalam jangka pendek mampu meningkatkan produktivitas dan mereduksi kemiskinan. Sementara itu, Wulandari & Aisyah (2021) menyebutkan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa dan Pulau Bali menurun seiring dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah untuk bidang ekonomi.

2.2.6. Kredit Usaha Rakyat dan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat diperlukan. Anggaran yang dimiliki pemerintah dapat menjadi stimulus untuk menurunkan angka kemiskinan. Hasibuan et al (2019) menjabarkan terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam program pengentasan kemiskinan dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi jumlah alokasi anggaran yang n maka tingkat kemiskinan semakin menurun. pengeluaran pemerintah sejatinya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis



yakni pembelian barang/jasa dan subsidi. Jenis yang pertama merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Sedangkan subsidi merupakan alat pemerintah dalam rangka retribusi pendapatan. Salah satu bentuk subsidi adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan kredit atau pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif. Alokasi KUR diperuntukkan bagi program-program pemberdayaan ekonomi rakyat terutama kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, pemberian fasilitas KUR oleh pemerintah melalui perbankan dimaksudkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al (2023) menyebutkan bahwa KUR berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM. Menurutnya, pemberian KUR yang tepat sasaran menjadi faktor yang menentukan pengaruh tersebut. Penelitian yang dilaksanakan di Maluku itu menghasilkan temuan bahwa KUR diberikan kepada sejumlah koperasi yang ada sebab lembaga itu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, KUR dapat meningkatkan usaha ekonomi rakyat.

Dalam penelitian sebelumnya, Raji (2021) terlebih dahulu menemukan kesimpulan bahwa KUR berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan IPM. Namun ia lebih spesifik menyebut bahwa kebijakan yang meningkatkan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan harus diupayakan oleh otoritas pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Adam & Page (2005), Fox (2015), Pang dan Lee (2004). Analisis yang muncul dari pemberian KUR bagi peningkatan IPM adalah



meningkatnya KUR akan meningkatkan pengeluaran masyarakat atau rumah tangga, baik rumah tangga produsen atau konsumen. Peningkatan ini akan sejalan dengan peningkatan standar hidup layak sebagaimana komposisi IPM yang ketiga. Dengan standar hidup yang meningkat, maka IPM juga akan meningkat. Standar hidup yang lebih baik juga mengindikasikan bahwa masyarakat mulai terlepas dari jeratan kemiskinan. Oleh karena itu, KUR pada gilirannya juga dapat mereduksi kemiskinan yang ada di masing-masing wilayah.

